



No : 33/OP/007 A/KDCN/I/2024

Malang, 25 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

Dewan Pimpinan Pusat PERBARINDO

KOMP. PATRA II NO. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass

DKI Jakarta

Perihal : Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Kridadhana Citranusa Tahun Laporan 2023

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK No.3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah pasal 12 bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Kridadhana Citranusa tahun 2023 sesuai ketentuan tersebut di atas yang meliputi :

1. Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Kridadhana Citranusa Tahun Laporan 2023
2. Tabulasi Hasil Penilaian *Self Assesment* PT BPR Kridadhana Citranusa
3. Faktor-Faktor Penilaian *Self Assesment* PT BPR Kridadhana Citranusa

Demikian agar menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT. BPR. Kridadhana Citranusa

Suati Rakhmawati

Direktur Utama

Tembusan :

- Kepala Kantor OJK Malang
- Majalah Media BPR
- Pemegang saham



No : 33/OP/ 007 B/KDCN/I/2024

Malang, 25 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

Pimpinan MEDIA BPR

KOMP. PATRA II NO. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass

DKI Jakarta

Perihal : Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Kridadhana Citranusa Tahun Laporan 2023

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK No.3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah pasal 12 bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Kridadhana Citranusa tahun 2023 sesuai ketentuan tersebut di atas yang meliputi :

1. Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Kridadhana Citranusa Tahun Laporan 2023
2. Tabulasi Hasil Penilaian *Self Assesment* PT BPR Kridadhana Citranusa
3. Faktor-Faktor Penilaian *Self Assesment* PT BPR Kridadhana Citranusa

Demikian agar menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT. BPR. Kridadhana Citranusa

Suati Rakhmawati

Direktur Utama

Tembusan :

- Kepala Kantor OJK Malang
- DPP Perbarindo
- Pemegang saham



No : 33/OP/007/KDCN/I/2024

Malang, 25 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang

Jl. Letjen Sutoyo No.109 - 111

Malang

Perihal : **Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Kridadhana Citranusa Tahun Laporan 2023**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK No.3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah pasal 12 bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Kridadhana Citranusa tahun 2023 sesuai ketentuan tersebut di atas yang meliputi :

4. Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Kridadhana Citranusa Tahun Laporan 2023
5. Tabulasi Hasil Penilaian *Self Assesment* PT BPR Kridadhana Citranusa
6. Faktor-Faktor Penilaian *Self Assesment* PT BPR Kridadhana Citranusa

Demikian agar menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT. BPR. Kridadhana Citranusa

Suati Rakhmawati

Direktur Utama

Tembusan :

- DPP Perbarindo
- Majalah Media BPR
- Pemegang saham

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Kridadhana Citranusa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666128-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601704-22012024181531

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

suatirakhmawati@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-22 18:15:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KRIDADHANA CITRANUSA**

Jl. Semeru Selatan No. 07 Dampit, Malang
Telp. +62341 896705
Email : kdcn_kp@yahoo.co.id Web : bprkridadhana.com

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN LAPORAN 2023

BANK SAHABAT ANAK NEGERI





Daftar Isi

Nama Form	Kode Form
Penjelasan Umum	A0000
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	A0110
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	A0120
Tugas dan Tanggung Jawab Komite	A0131
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	A0132
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	A0133
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	A0210
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	A0220
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	A0310
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	A0320
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	A0410
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	A0420
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	A0510
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	A0520
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	A0610
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	A0620
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	A0700
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun	A0810
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	A0820
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	A0900
Permasalahan Hukum yang Dihadapi	A1000
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	A1100
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	A1200
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	B0000
Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	B0001
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	B0100
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	B0200
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	B0300
Penanganan Benturan Kepentingan	B0400
Penerapan Fungsi Kepatuhan	B0500
Penerapan Fungsi Audit Intern	B0600
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	B0700
Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	B0800
Batas Maksimum Pemberian Kredit	B0900
Rencana Bisnis BPR	B1000
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	B1100
Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola	C0000
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR (yang telah ditandatangani)	C0001

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : Jl. Semeru Selatan No.7 Dampit Kab. Malang
Nomor Telepon : 0341896705
Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola BPR Kridadhana Citranusa posisi 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Suati Rakhmawati	Direktur Utama	Direktur Utama
2	Andreas Roy Dirgantara Abadi	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Menjaga NPL dibawah 5% dan melaksanakan RBB 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penyaluran kredit sesuai prinsip kehati-hatian, menyelesaikan nasabah bermasalah sesuai ketentuan dan menindaklanjuti temuan auditor intern dan ekstern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Suryadin Achmad	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	Surjaningrum Notodihardjo	Komisaris	Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Menjaga NPL dibawah 5% dan mengawasi pelaksanaan RBB 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pengawasan penyaluran kredit sesuai prinsip kehati-hatian, penyelesaian nasabah bermasalah sesuai ketentuan dan pengawasan tindaklanjuti temuan auditor intern dan ekstern oleh Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Andreas Roy Dirgantara Abadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Suati Rakhmawati	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suati Rakhmawati	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Andreas Roy Dirgantara Abadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Suryadin Achmad	240.000.000	7,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Suryadin Achmad

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Suryadin Achmad	PT BPR Delta Arta Kencana	10,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Suryadin Achmad

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Suryadin Achmad	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Surjaningrum Notodihardjo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisari tidak mempunyai hubungan keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Suryadin Achmad	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Surjaningrum Notodihardjo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	446400000	2	162000000
2	Tunjangan	2	42000000	2	7500000
3	Tantiem	2	185200000	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	40700000	2	13500000
	Total		714300000		183000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	BBM Mobil Dinas	BBM Kehadiran

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,68	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,24	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,08	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,22	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,22	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-01-2023	4	Mengenai perkembangan jalannya operasional BPR sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, Pertumbuhan dan Pencapaian kinerja.
2	15-04-2023	4	Mengenai perkembangan jalannya operasional BPR sampai dengan Triwulan I tahun 2023, penanganan kredit bermasalah dan tindaklanjut progres pemeriksaan OJK 2022.
3	07-07-2023	4	Mengenai perkembangan jalannya operasional BPR sampai dengan Triwulan II tahun 2023, pencapaian realisasi dibandingkan Triwulan II 2023, proyeksi dan realisasi, rasio-rasio RBB semester II 2023.
4	06-10-2023	4	Mengenai proyeksi dan realisasi RBB semester III 2023, penanganan kredit bermasalah dan AYDA di atas 2 tahun.
5	11-11-2023	4	Mengenai RBB 2024 dan tindaklanjut temuan pemeriksaan OJK 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Suryadin Achmad	5	0	100,00
2	Surjaningrum Notodihardjo	5	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Dewan Komisaris selain melakukan rapat, juga melakukan tugasnya sebagai pengawas kepada pengelola, yang hadir setiap saat di kantor pusat BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Surat Gugatan Lelang atas nama Kusnoto

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	SK Direksi No. DIR/792 A/KDCN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan Tata Kelola
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Pedoman dan Prosedur Benturan Kepentingan berlaku untuk Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pegawai
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Belum terjadi di BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	Tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Memahami, jika ada kendala dikonsultasikan dengan pengawas OJK dan pihak terkait lainnya
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Surat Keputusan Direksi No. DIR/918/KDCN/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, Sdri. Mera Sudiartini
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Mengkinikan sesuai arahan pengawas OJK
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	SK Direksi No. DIR/792 A/KDCN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan Tata Kelola
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Membuat daftar laporan yang harus disampaikan kepada OJK dan otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Secara bertahap mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Secara bertahap menjaga komitmen terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Secara bertahap seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Secara bertahap melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Kebijakan dan keputusan Direksi sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Surat Keputusan Direksi No. DIR/827/KDCN/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, Sdri. Priskila Lediani Setjo, Surat OJK No. S-16/KO.04011/2018, tanggal 24 Januari 2018
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Independen
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Belum memiliki tetapi meningkatkan pengetahuan dan pelatihan dan sosialisasi PE AI
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Peningkatan pengetahuan dengan pelatihan dan sosialisasi PE AI
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Surat Penugasan Audit No. 32/0040/KDCN/X/2023, tanggal 02-10-2023, Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan No. 32/OP/0041/KDCN/X/2023 tanggal 04-10-2023
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	RUPSLB tanggal 24-06-2023
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Akan disampaikan oleh KAP atau BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Akan disampaikan tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Surat Keputusan Direksi No. DIR/918/KDCN/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, Sdri. Mera Sudiartini
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Manajemen Risiko via Apollo meliputi 4 risiko
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum ada produk dan aktivitas baru sesuai RBB 2023
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 08-11-2019 No. 868/XI/2019 Revisi ke-3
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 08-11-2019 No. 868/XI/2019 Revisi ke-3
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 08-11-2019 No. 868/XI/2019 Revisi ke-3
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	LBBPR bulanan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	LHP Tahun 2023 No.SRRB-19/KO.14011/2023 tanggal 23 Desember 2023. BPR telah membuat rencana tindak penyelesaian BMPK Kelompok tanggal 01 November 2023

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Laporan RBB tahun 2024 tanggal 08 Desember 2023
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Menggambarkan strategi bisnis dan kebijakan, laporan keuangan dan rasio-rasio serta sebagian permasalahan beserta rencana penyelesaiannya
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Didukung sepenuhnya oleh PS, SDM, TI, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Telah mempertimbangkan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata tertib Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan RBB via Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) tanggal 08 Desember 2023
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	CBS - Heasoft
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	LBBPR - Publikasi triwulanan via apolo.ojk.go.id
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan triwulan IV, Laporan Publikasi Tahunan yang belum diaudit oleh KAP dan ditempel pada papan pengumuman di jaringan kantor
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.24/DIR/797/KDCN/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015 - Pedoman dan Prosedur Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Self Assesment Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa keuangan setahun sekali per 30 September
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Publikasi triwulanan via apolo.ojk.go.id di papan pengumuman di jaringan kantor
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan pengaduan triwulan I, II, III dan IV 2023 via SIPEDULI
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



LEMBAR PERSETUJUAN

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2023 yang telah kami capai yang kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2024

PT. BPR. KRIDADHANA CITRANUSA

Suati Rakhmawati
Direktur Utama

Suryadin Achmad
Komisaris Utama



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : BPR Kridadhana Citranusa
Posisi : 31 Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.0	Baik
Analisis	
<p>Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan 11 faktor masih perlu perbaikan yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah mempunyai pedoman Tata Kelola dan mengangkat Pejabat Eksekutifnya.</p>	

Malang, 16 Januari 2024

PT. BPR. KRIDADHANA CITRANUSA

Suati Rakhmawati
Direktur Utama

Suryadin Achmad
Komisaris Utama

